

JAWABAN TUGAS 3

Rhiza S. Sadjad

NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : **SOSI4308.7/Sosiologi Perkotaan 7**
Tugas : 3

Pertanyaan 1/3:

Rumuskan permasalahan kritis perkotaan yang dihadapi di kota Anda!

Jawaban 1/3:

Saya tinggal di kota kelahiran saya, Bogor, Jawa Barat. Kota Bogor pada waktu saya lahir 67 tahun lalu, dengan kota Bogor sekarang kondisinya sudah sangat jauh berbeda. Luas wilayahnya saja sekarang sudah beberapa kali lipat dibandingkan dulu. Pemekaran wilayah dilakukan dengan “mencaplok” wilayah pedesaan yang dahulunya menjadi bagian dari Kabupaten Bogor. Bogor sendiri sebelum menjadi kota mandiri, adalah ibukota Kabupaten Bogor merangkap ibukota Keresidenan Bogor Raya yang meliputi wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Ada gagasan untuk memekarkan wilayah eks-Keresidenan Bogor Raya ditambah sebagian wilayah Bekasi dan Tangerang menjadi provinsi tersendiri yang terpisah dari Provinsi Jawa Barat. Tapi rencana yang lebih realistis adalah pengembangan suatu wilayah *megalopolitan* yang meliputi Daerah Khusus Jakarta (d/h DKI Jakarta), Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, disingkat Jabodetabek. Jadi permasalahan kritis yang dihadapi kota Bogor saat ini adalah **transisi** untuk mekar menjadi ibukota dari suatu provinsi baru, yaitu Provinsi Bogor Raya, atau mekar bersama-sama wilayah-wilayah kota dan kabupaten di sekitarnya menjadi suatu wilayah megalopolitan, yaitu Jabodetabek, mungkin dengan tambahan sebagian wilayah Sukabumi. Masalah kritis yang dihadapi Kota Bogor yang pertama adalah tiadanya visi jangka panjang yang jauh ke depan tentang “nasib” kota ini, apakah akan terserap ke dalam megalopolitan Jabotabek, atau menjadi ibukota suatu provinsi baru.



Gambar 1

Masalah Kota Bogor Hari Ini

(Sumber: “*Radar Bogor*”, 6 Desember 2024, hal. 12)

Masalah kritis yang lain, yang sebenarnya merupakan masalah “*typical*” banyak kota di negara-negara berkembang [2], yaitu masalah kemiskinan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1, yang diberitakan oleh surat-kabar “*Radar Bogor*” yang terbit pagi ini, ketika tulisan ini ditulis. Sebenarnya semua masalah kritis yang dihadapi sebuah kota seperti Kota Bogor saling berkaitan satu sama lain. Masalah-masalah seperti kekumuhan, kemacetan lalu-lintas, masalah pemukiman, fasilitas perumahan, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya, boleh dikatakan semua berakar pada masalah kemiskinan. Masalah ini menyulitkan perencanaan kota dalam jangka panjang, karena asal-muasalnya, Kota Bogor di-rancang-bangun (oleh pemerintah kolonial pada masa lalu) untuk menjadi kota pemukiman dan peristirahatan bagi kaum *elite* yang bekerja di Jakarta (d/h Batavia), sesuai dengan nama Bogor pada jaman kolonial, yaitu *Weltevreden*, yang artinya “dalam suasana tenang dan puas”. Tentu saja, karena yang tinggal di Kota Bogor pada jaman kolonial adalah kaum *elite* – termasuk penguasa tertinggi pemerintah kolonial, Gubernur Jenderal, yang tinggal di Istana Bogor – khususnya pada akhir pekan.

Pertanyaan 2/3:

Bagaimana pendekatan sosiologi perkotaan dalam mengatasi permasalahan kritis perkotaan tersebut?

Jawaban 2/3:

Karena masalah-masalah kritis yang dihadapi oleh Kota Bogor saling berkaitan satu sama lain, maka pendekatan sosiologi perkotaan yang seyogyanya diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang kritis itu adalah pendekatan yang bersifat *multi-dimensional* dan komprehensif untuk rentang waktu jangka panjang. Beberapa dimensi pendekatan sosiologis yang bisa digunakan misalnya antara lain: (1) pendekatan dimensi ekologi sosial untuk memahami hubungan antara warga Kota Bogor dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, (2) pendekatan dimensi politik-ekonomi untuk memahami struktur ekonomi dari masyarakat Kota Bogor, khususnya yang mengakibatkan kesenjangan antara kaya dan miskin yang semakin melebar, (3) pendekatan dimensi sosial-budaya yang berbasis komunitas untuk membangun kekuatan jejaring dan memberdayakan masyarakat kelas menengah ke bawah, dan (4) pendekatan dimensi “*livability*” untuk meningkatkan kelayakan hidup warga masyarakat, baik yang tinggal menetap dan bekerja di Kota Bogor, mau pun yang sekedar “numpang lewat”. Dengan berbagai pendekatan sosiologi perkotaan ini, akan memudahkan bagi pemerintah kota me-rancang-ulang Kota Bogor dengan perencanaan yang komprehensif untuk rentang waktu jangka-panjang. Fungsi Kota Bogor harus di-definisi-kan ulang, yang tentunya sudah tidak mungkin lagi dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai kota yang “*weltevreden*” seperti pada jaman kolonial.

Pertanyaan 3/3:

Bagaimana solusi Anda mengatasi permasalahan kritis perkotaan tersebut berdasarkan teori sosiologi perkotaan?

Jawaban 3/3:

Yang pertama harus dilakukan adalah membuat kajian ilmiah berdasarkan pendekatan multi-dimensional sebagaimana yang diuraikan pada jawaban *Pertanyaan 2/3* sebelumnya untuk menghasilkan suatu naskah akademik yang dikukuhkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor. Naskah akademik ini harus merupakan *blue-print* yang visioner bagi pemerintahan kota selanjutnya dalam menetapkan langkah-langkah rancang-bangun Kota Bogor yang bertahap, konsisten dan sistemik. Langkah-langkah solutif yang disarankan untuk mengatasi permasalahan kritis Kota Bogor meliputi antara lain:

1. Menyusun **rencana strategis** jangka panjang yang terpadu, holistik dan komprehensif lintas sektoral, dengan memperhatikan berbagai dimensi permasalahan. Landasan teoritis diperoleh dari referensi [2.(a)].
2. Menggalang ke-ikut-sertaan warga masyarakat (**partisipasi publik**) dalam penyusunan rencana strategis untuk menggali aspirasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Landasan teoritis diperoleh dari referensi [2.(b)].
3. Menitik-beratkan prinsip **keberlanjutan** (*sustainability*) dan pelestarian lingkungan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pembangunan sesuai rencana strategis yang telah disusun. Landasan teoritis diperoleh dari referensi [2.(c)].
4. Senantiasa merujuk dan berpijak pada **data dan informasi** yang akurat ketika menetapkan suatu kebijakan publik. Landasan teoritis diperoleh dari referensi [2.(d)].
5. Memprioritaskan **kesejahteraan umum** yang berdasarkan kesetaraan, keadilan dan persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga masyarakat tanpa ada yang dikecualikan (*inclusive*). Landasan teoritis diperoleh dari referensi [2.(e)].

REFERENSI

- [1] **Drajat Tri Kartono**, “*Sosiologi Perkotaan*”, **Modul 1 – 9, SOSI4308**, Edisi 4, [Agustus 2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **ChatGPT**, Aplikasi Chatting berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android, <https://OpenAI.com> , <https://ChatGPT.com> yang merekomendasikan beberapa referensi untuk landasan teoritis:
 - (a) **Kevin Lynch**, [1960], “*The Image of the City*”
 - (b) **Sherry Arnstein**, [1969], “*A Ladder of Citizen Participation*”
 - (c) **Ian McHarg**, [1969], “*Design with Nature*”
 - (d) **William H. Whyte**, [1980], “*The Social Life of Small Urban Spaces*”
 - (e) **Henri Lefebvre**, [1968], “*The Right to the City*”